

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh)

DARWANIS

Universitas Syiah Kuala

RYANDA SAPUTRA

Universitas Syiah Kuala

Abstract

The research aims to analyze the influence of Capital Expenditure on the original income and its impact on Local Government Financial Performance This research refers to a previous research's conducted by Fajar Nugroho (2012). Objects of this research are the entire district and city in Aceh province. The research was carried out by the method of documentation. The data used are secondary data, which comes from the realization of the Budget Report Revenue and Expenditure of the district and the city in Aceh province from 2009 until 2012. The results of this study indicate that the Capital Expenditures negatively affect of the region's financial performance directly, whereas indirect positive effect on Capital Spending Growth through Revenue Financial Performance as an intervening variable region. The results of this study indicate that the capital expenditure effect on the Local original income, Local original income effect on financial performance, capital expenditures does not affect on the financial performance directly, while indirectly capital expenditure effect on financial performance through local original income.

Keywords: *Capital Expenditure, revenue, Financial Performance, the realization of the Budget Report Revenue and Expenditure.*

1. Pendahuluan

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Adapun arti dari keuangan daerah itu sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut (Halim, 2007:20). Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut (Nugroho, 2012).

Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator penting dalam dalam menilai kinerja pemerintah. Namun, Kinerja keuangan pemerintah di Indonesia masih dipandang buruk hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Wakil Presiden RI, Boediono (Kompas.com, 2012), Laporan akuntabilitas kinerja ini yang tampaknya perlu lebih

didorong lagi. Saya belum puas, Masih ada poin yang belum diseriisi. Ini penting karena kinerja merupakan sisi lain dari keuangan. Kemudian Salahudin yang merupakan pengajar mata kuliah sistem penganggaran pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Malang yang dikutip melalui (Suar.okezone.com, 2013) menyatakan bahwa masih buruknya kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) termasuk APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sesuai dengan laporan Menteri Keuangan yang melaporkan SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) APBD Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp 99,24 triliun. Besarnya SILPA APBD tersebut menunjukkan buruknya kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Analisis keuangan berperan sangat penting sebagai usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia (Halim, 2007:231). Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan pertumbuhan (Sularso & Restianto, 2011).

Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang terdapat dalam laporan realisasi APBD yang terdiri dari pendapatan dan belanja daerah. Dari sekian banyak komponen yang terdapat dalam laporan realisasi APBD diyakini bahwa kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh belanja modal dan PAD (Pendapatan Asli Daerah), dengan alasan yaitu semakin banyak belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian dalam hal ini adalah kinerja pemerintah daerah. Pemerintah dapat meningkatkan PAD melalui pungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayan publik yang bersumber dari dana yang telah dialokasikan dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Sehingga pemerintah daerah secara terus-menerus dapat memacu pertumbuhan kinerja keuangannya.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004:73). Belanja modal merupakan salah satu belanja pemerintah yang menjadi perhatian khusus pemerintah seperti yang diungkapkan oleh staf khusus presiden bidang ekonomi dan pembangunan, Firmanzah melalui (pikiran-rakyat.com, 2013) bahwa pemerintah akan terus menggenjot belanja pemerintah, terutama belanja modal. Namun, Menurut wakil ketua Fraksi PKS bidang ekonomi, keuangan, industri dan teknologi (ekuintek) Iman melalui (bisnisaceh.com, 2013) menilai pencapaian realisasi belanja modal pemerintah masih belum optimal dan mengecewakan. Sampai akhir September tahun 2012 belum mampu mencapai 50 persen, baru 36,8 persen. Padahal pemerintah sebelumnya menjanjikan akan jauh lebih baik karena masalah tanah untuk pembangunan sudah selesai dan tender juga sudah diadakan lebih awal.

Dengan berkembang pesatnya pembangunan yang bersumber dari alokasi belanja modal diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya karena PAD ini sendiri merupakan komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tulang punggung dalam pembiayaan daerah. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Dalam kontribusinya terhadap APBD dimana semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap

bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD memberi arti yang sangat penting bagi pemerintah daerah karena dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Nugroho (2012) sebagai penelitian replikasi dengan beberapa perbedaan yang membedakan. Pertama, Periode penelitian ini menggunakan periode empat tahun, dimulai dari tahun 2009-2012. Kedua, Rasio pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio pertumbuhan (Trend). Ketiga, Untuk mengukur pengaruh variabel intervening menggunakan analisis jalur (path analysis), keempat, Daerah penelitiannya dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, peneliti memutuskan hal tersebut dikarenakan peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh secara keseluruhan mulai dari tahun 2008-2012. Penelitian ini sangat penting karena dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh penerimaan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh".

2. Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Belanja Modal

Menurut PSAP Nomor 02, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender (PP Nomor 71, 2010). Sedangkan menurut Halim (2004:73), Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat terlepas dari keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 maka berbagai prinsip dasar yang ada dalam Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kembali dipertegas dan menjadi acuan dalam pengalihan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tiga tahapan yaitu: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Sedarmayanti

(2007:260) mengungkapkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja seseorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, pasal 1 ayat 37 tentang pengelolaan keuangan daerah, Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Kerangka pemikiran

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004:73). Menurut KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) dalam PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) Nomor 02, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Ardhani, 2011).

Belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah secara langsung, sedangkan secara tidak langsung belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening (Nugroho, 2012). Upaya dalam menggenjot belanja modal merupakan perkara yang sangat penting bagi pemerintah daerah karena dapat meningkatkan produktivitas perekonomian sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan semakin besar alokasi belanja modal pada tahun selanjutnya. Hal ini akan memberi dampak yang baik terhadap pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun ketahun secara terus-menerus.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli daerah

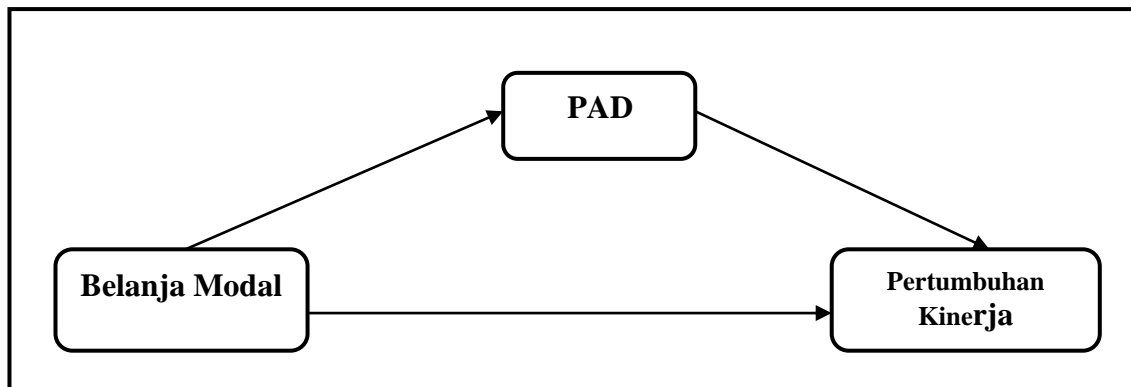
Suatu daerah untuk menambah aset tetap daerahnya yang dapat berupa pembangunan infrastruktur sebagai sarana untuk pelayanan publik, Maka pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam anggaran pendapatan belanja daerahnya, Sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayanan publik tersebut sebagai upaya dalam meningkatkan PAD.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Melalui PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagai Variabel Intervening.

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:94). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri.

Pemerintah dapat menggenjot PAD melalui pungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayan publik yang bersumber dari dana yang telah dialokasikan dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Sehingga pemerintah daerah secara terus-menerus dapat memacu pertumbuhan kinerja keuangannya. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah (Florida, 2007).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka skema kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Belanja modal berpengaruh terhadap PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
2. PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
3. Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

3. Metode Penelitian

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Teknik penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode sensus adalah metode dengan mengambil sampel seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Aceh. Data sampel yang digunakan adalah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh yaitu 23 kabupaten/kota.

Operasionalisasi Variabel

Pada Tabel 1 dibawah ini bisa dilihat rumus yang digunakan dalam setiap variabel didalam penelitian ini.

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Dependen			
Kinerja Keuangan	Nugroho (2012) memberikan definisi bahwa Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut	Rasio pertumbuhan (<i>growth ratio</i>)	Rasio
Independen			
Belanja Modal	Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Tanah 2. Belanja Peralatan dan Mesin 3. Belanja Gedung dan Bangunan 4. Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan 5. Belanja Aset Tetap Lainnya 	Rasio
Intervening			
PAD	Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang Sah 	Rasio

Metode Analisis dan Rancangan Hipotesis

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, dan sebagainya (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pertumbuhan kinerja keuangan daerah, pendapatan asli daerah, dan belanja modal.

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas terhadap data.

Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis regresi dengan variabel intervening. Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi untuk mengestimasi hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Berdasarkan analisis jalur dapat diketahui besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel. Pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel dapat dilihat sebagai berikut:

Pengaruh langsung $BM \rightarrow KK$
 Pengaruh tidak langsung $BM \rightarrow PAD \rightarrow KK$

Persamaan matematis untuk hubungan yang dihipotesiskan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PAD = b_1 BM + e \dots\dots\dots (H1)$$

$$KK = b_1 BM_{t-1} + b_2 PAD_t + e \dots\dots\dots (H2)$$

Keterangan dari Masing-masing lambang yang digunakan adalah:

BM = Belanja Modal
 PAD = Pendapatan Asli Daerah
 KK = Kinerja Keuangan
 b_1, b_2 = Koefisien
 e = *Error*

Rancangan Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan metode analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (Ghozali, 2006:160). Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Menentukan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a).

H_{01} : Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

H_{a1} : Belanja modal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

H_{02} : Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

H_{a2} : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan

H_{03} : Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah

H_{a3} : Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan dan PAD sebagai variabel intervening pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2009-2012.

Deskriptif Sampel Penelitian

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari laporan realisasi anggaran tahun 2009 sampai tahun 2012. Dari laporan realisasi APBD tersebut yang menjadi objek penelitian adalah realisasi belanja modal, pendapatan asli daerah, dan kinerja keuangan yang dilihat dari realisasi APBD dan dibandingkan dengan realisasi APBD tahun sebelumnya. Jumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebanyak 23 daerah kabupaten/kota yang dilakukan dengan teknik penelitian menggunakan sensus dalam periode pengamatan sebanyak 4 tahun, maka diperoleh deskriptif statistik data penelitian sebagai berikut pada Tabel 2:

Tabel 2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	92	45058407,00	3,20E8	8,9720E7	3,86480E7
PAD	92	3054708,00	99022803,00	2,1095E7	1,77975E7
KK	92	-39,10	68,02	9,2404	15,72306
Valid N (listwise)	92				

Sumber: data diolah (2013)

Uji Normalitas

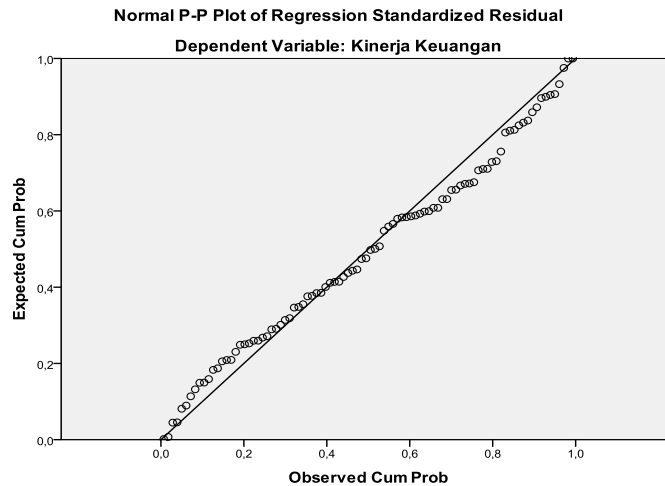
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang diuji normal atau tidak. Hasil pengujian normalitas data pada variabel belanja modal, pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	15,55946787
Most Extreme Differences	Absolute	,084
	Positive	-,062
	Negative	,803
Kolmogorov-Smirnov Z		,540
Asymp. Sig. (2-tailed)		

Gambar 2. Uji Normalitas Data Model

Berdasarkan tampilan uji normalitas dengan model *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian yang ditunjukkan dengan nilai sig Z 0,803 pada observasi sebanyak 92 sudah berdistribusi normal.



Gambar 3 Normal P-P Plot

Berdasarkan analisis lebih lanjut dengan menggunakan *Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual* Dari gambar grafik di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah ditemukan atau tidak kemiripan diantara variabel-variabel. Untuk dapat melihat ada tidaknya multikolinieritas dengan melihat angka *colinierity statistic* yang ditunjukkan oleh nilai VIF dan nilai *tolerance*, dengan kriteria: jika nilai VIF > dari 10 dan nilai *tolerance* < dari 0,1 maka variabel bebas yang ada memiliki masalah multikolinieritas (Lubis, 2007). Hasil pengujian multikolinearitas pada variabel belanja modal, pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel 4:

**Tabel 4
Uji Multikolinieritas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	24,580	3,000		8,192	,000		
	Belanja Modal	-1,801E-7	,000	-,583	-6,195	,000	,873	1,146
	PAD	7,452E-8	,000	,084	,896	,373	,873	1,146

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	24,580	3,000		8,192	,000		
	Belanja Modal	-1,801E-7	,000	-,583	-6,195	,000	,873	1,146
	PAD	7,452E-8	,000	,084	,896	,373	,873	1,146

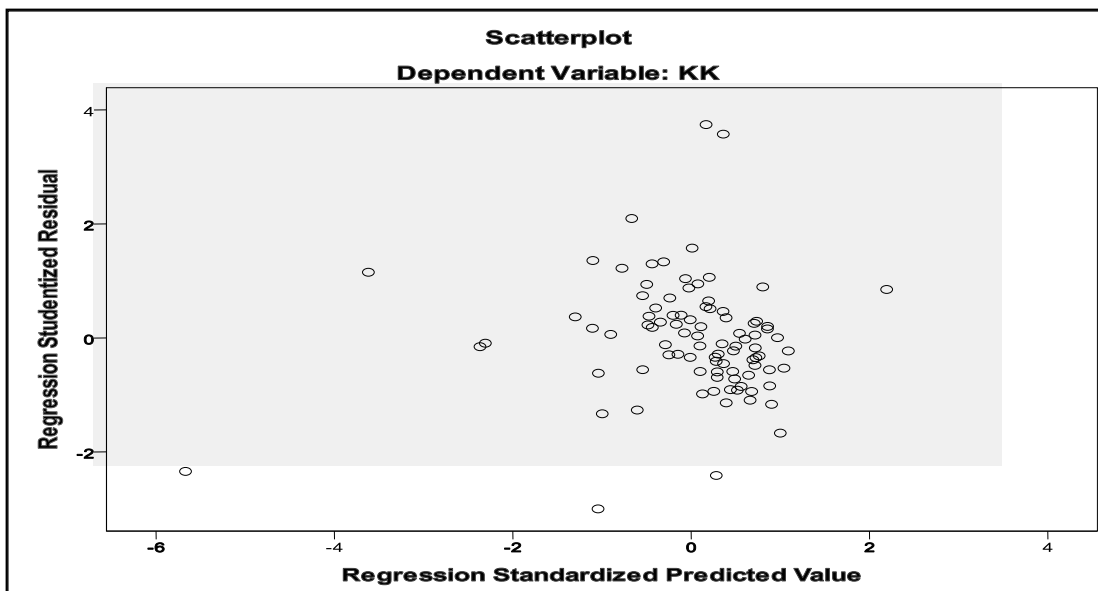
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Data diolah (2013)

Hasil uji statistik nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1 dan begitu juga dengan hasil perhitungan VIF menunjukkan nilai < 10 .

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi perbedaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada grafik plot (*scatter-plot*) antara nilai prediksi variabel terkait (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heterokedastisitas.



Gambar 4 Uji Heterokedastisitas

Grafik *scatterplot* pada Gambar 4 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak

membentuk pola tertentu yang teratur, yang mengindikasikan tidak terjadi heterokedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *path analysis* dengan dua persamaan yaitu:

$$1. PAD = b_1 BM + e_1$$

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dan diperoleh kesimpulan bahwa model sudah dapat digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan Analisis Jalur (*Path Analysis*). Pengujian hipotesis pertama (H_1) untuk menguji belanja modal terhadap pendapatan asli daerah. Nilai koefisien *path* dapat dilihat pada Tabel 5:

Tabel 5
Uji Regresi untuk Persamaan (1)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9379519,687	3672962,292		2,554	,012
BM	,125	,034	,357	3,624	,000

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data diolah (2013)

Berdasarkan perhitungan *path analysis*, pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah diperoleh koefisien jalur sebesar 0,357. Berhubung penelitian ini menggunakan sensus, maka tidak dilakukan pengujian signifikansi terhadap nilai koefisien *path* tersebut, karena nilai koefisien *path* yang diperoleh adalah nilai yang sesungguhnya dari populasi. Oleh karena $0,357 > 0$, maka penelitian ini menerima H_{a1} dan menolak H_{o1} .

$$2. KK = b_1 BM_{t-1} + b_2 PAD_t + e_2$$

Pengujian hipotesis kedua dan ketiga (H_2 , H_3) untuk menguji belanja modal melalui pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan. Nilai koefisien *path* dapat dilihat pada Tabel 6:

Tabel 6
Uji Regresi untuk Persamaan (2)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	24,580	3,000		8,192	,000
Belanja Modal	-1,801E-7	,000	-,583	-6,195	,000
PAD	7,452E-8	,000	,084	,896	,373

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24,580	3,000		8,192	,000
	Belanja Modal	-1,801E-7	,000	-,583	-6,195	,000
	PAD	7,452E-8	,000	,084	,896	,373

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan
 Sumber: Data diolah (2013)

Berdasarkan perhitungan *path analysis*, pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan diperoleh koefisien jalur sebesar 0,084. Berhubung penelitian ini menggunakan sensus, maka tidak dilakukan pengujian signifikansi terhadap nilai koefisien *path* tersebut, karena nilai koefisien *path* yang diperoleh adalah nilai yang sesungguhnya dari populasi. Oleh karena $0,084 > 0$, maka penelitian ini menerima H_{a2} dan menolak H_{o2} .

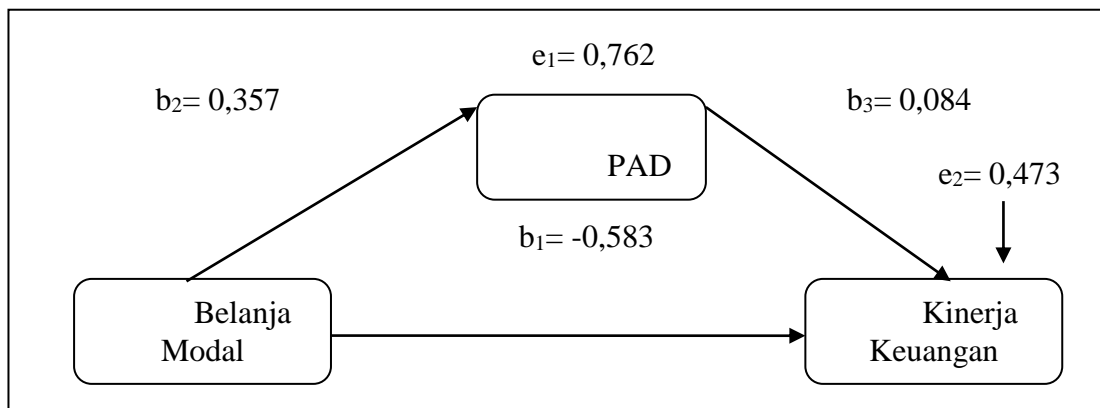
Berdasarkan perhitungan *path analysis* pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa belanja modal berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan tetapi belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah. oleh karenanya, penelitian ini menerima H_{a3} dan menolak H_{o3} .

Dari hasil *path analysis* dapat dilihat dalam persamaan berikut:

$$PAD = b_1 BM + e_1 \dots\dots\dots (1)$$

$$KK = b_1 BM_{t-1} + b_2 PAD_t + e_2 \dots\dots\dots (2)$$

Hasil dalam bentuk diagram ditunjukkan pada Gambar 4.4:



Gambar 5. Hasil Diagram *Path* Kerangka Koefisien Jalur

Dari gambar 4.4 dapat dilihat bahwa nilai e_1 merupakan hasil dari pengurangan R^2 dengan rumus $e_1 = (1-R^2)^2$, sehingga diperoleh $e_1 = (1-0,127)^2 = (0,873)^2 = 0,762$. Nilai e_2 juga merupakan hasil dari pengurangan dengan R^2 dengan rumus $e_2 = (1-R^2)^2$, sehingga diperoleh $e_2 = (1-0,312)^2 = (0,688)^2 = 0,473$.

Pembahasan

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis pertama dalam penelitian ini mengenai adanya pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah. Dari Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel belanja modal (X) terhadap pendapatan asli daerah (Z) menunjukkan angka

positif. Ini berarti bahwa semakin besar belanja modal yang dibelanjakan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hasil pengolahan data dengan menggunakan *path analysis* dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Pengaruh Belanja Modal (X) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Z) Secara Langsung Dan Tidak Langsung

Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total
X ke Z	$(0,357)^2 \times 100\% = 12,7\%$		12,7%
Pengaruh Secara Simultan			12,7%
Variabel Lain			87,3%

Sumber: Data diolah (2013)

Dari Tabel 7 dapat diketahui bahwa pengaruh variabel belanja modal (X) terhadap pendapatan asli daerah (Z) secara langsung sebesar 12,7%. Dengan demikian belanja modal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sisanya sebesar 87,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diikuti dalam penelitian ini.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Hipotesis kedua dalam penelitian ini mengenai adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan. Dari gambar 4.4 dapat dilihat bahwa koefisien dari pendapatan asli daerah (Z) terhadap kinerja keuangan (Y) adalah positif. Hal ini berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah akan sangat mendukung pertumbuhan kinerja keuangan. Besarnya pengaruh langsung pendapatan asli daerah (Z) terhadap kinerja keuangan (Y) adalah sebesar $(0,084)^2 \times 100\% = 0,7\%$.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini mengenai adanya pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah. Dari Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel belanja modal (X) terhadap kinerja keuangan (Y) menunjukkan angka negatif. Ini berarti belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan tetapi belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan data dengan menggunakan *path analysis* pada Tabel 8.

Tabel 8
Pengaruh Belanja Modal (X) Terhadap kinerja Keuangan (Y) Melalui Pendapatan Asli Daerah (Z) Secara Langsung Dan Tidak Langsung

Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total
X ke Y	$(-0,583)^2 \times 100\% = 33,9\%$		34,6%
Z ke Y	$(0,084)^2 \times 100\% = 0,7\%$		
X ke Y Melalui Z		$2(-0,583 \times 0,084 \times 0,357) \times 100\% = -0,034\%$	-3,4%
Pengaruh Secara Simultan			31,2%
Variabel Lain			68,8%

Sumber: Data diolah (2013)

Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa pengaruh variabel belanja modal (X) terhadap kinerja keuangan (Y) secara langsung sebesar 33,9%. pengaruh variabel pendapatan asli daerah (Z) terhadap kinerja keuangan (Y) secara langsung sebesar 0,7%. Pengaruh tidak langsung variabel belanja modal (X) terhadap kinerja keuangan (Y) melalui pendapatan asli daerah (Z) sebesar 3,4%. jadi, total pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung sebesar 31,2% (merupakan penjumlahan anatara $33,9\% + 0,7\% - 3,4\%$). Dengan demikian belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah, sisanya sebesar 68,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar penelitian. Hasil ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nugroho (2012) yaitu Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening.

Dari Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatnya belanja modal berarti pemerintah daerah telah melakukan upaya peningkatan pembangunan infrastruktur untuk dapat digunakan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dalam melakukan pekerjaannya, dengan ini masyarakat dapat membayar segala macam bentuk pajak dan retribusi daerah yang nantinya akan meningkatkan pendapatan asli daerah, peningkatan pendapatan asli daerah ini juga yang kemudian akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi tuntutan masyarakat.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pada analisis data, uji hipotesis, serta pembahasan penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Model pertama dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012).
2. Model kedua juga terdapat pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan. Hal ini terlihat dari koefisien yang ditunjukkan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan adalah positif. Hasil ini penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Florida (2006).
3. Model ketiga dalam penelitian belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan namun belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel 4.6. Hasil penelitian selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nugroho (2012).

Keterbatasan Penelitian

1. Populasi dalam penelitian ini hanya meliputi 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, sehingga generalisasi hasil temuan dan rekomendasi penelitian ini menyebabkan kurang dapat diberlakukan bagi daerah lain di luar Aceh.
2. Menggunakan data rentang waktu yang pendek yaitu hanya pada pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan runtun waktu 2009-2012 sedangkan untuk belanja modal tahun periode 2008-2011. Ini menyebabkan data-data pada penelitian ini kurang memiliki ketepatan atau keakuratan sehingga hasilnya kurang sempurna.

Saran

Dari hasil penelitian maka dapat disarankan:

1. Kepada peneliti selanjutnya dapat memilah jumlah belanja modal yang digunakan pemerintah untuk membiayai pemebangunan infrastruktur yang dapat menghasilkan PAD dengan pemebangunan infrastruktur yang tidak dapat menghasilkan PAD.

2. Memperluas obyek penelitian yang tidak terbatas pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh saja dengan menambah kabupaten/kota Provinsi lain sebagai sampel, sehingga memungkinkan adanya perbandingan belanja modal yang mempengaruhi kinerja keuangan.

Daftar Pustaka

- Adi, Priyo Hari. 2007. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Agung, Laksana S. Belanja Modal Pemerintah Tak Dorong Pertumbuhan Ekonomi. Melalui <http://www.kompas.com.htm> [15/09/13].
- Ardhani, Pungky. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Anastasia, Melisa Andi. 2012. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Arifin, Johan. 2002. Respon Strategik Perusahaan Perbankan dalam Menghadapi Globalisasi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 2. No.1. Jakarta.
- Bastian, Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.
- Firmanzah. Pemerintah Genjot Belanja Modal untuk Antisipasi Perlambatan Ekonomi Cina. Melalui <http://www.pikiran-rakyat.com.node> [15/09/13].
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Greiling, Dorothea. 2005. Performance measurement in the public sector: the German experience. *Emerald Research*, Vol. 54: 551-567.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Henderson, Dale. A and W Chase, Bruce. 2002. Performance Measure for NPOs (Not for Profit OrganizationI). *Journal of accounting*.
- Halachmi, Arie. 2005. Performance Measurement is Only One Way of managing Performance. *International Journal of Productivity and Performance Management*. Vol.54: 502-516.
- Iman, Sohibul. Serapan Belanja Pemerintah Mengecewakan. Melalui <http://www.bisnisaceh.com.php> [15/09/13].
- Kurniawan, Kindy. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening di Kabupaten dan Kota Propinsi Riau*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Kaho, J. R. 1998. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Daerah & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

- Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
- Koto, Hendro. Kinerja Pemerintah Aceh Buruk. Melalui <www.waspada.co.id.php> [15/09/13].
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi kedua. Yogyakarta. STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Serial Otonomi Daerah. Yogyakarta: ANDI.
- Muis, Hilwa Noni. 2012, *Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera utara.
- Nazir, Moh. 2005, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasution, Andriany Nina. 2010. *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupatendan Kota di Propinsi Sumatera Utara*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Nugroho, Fajar. 2012 *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06 Tahun 2007 *tentang Bagan Akun Standar*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 200 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Salahudin. *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Memiskinkan*. Melalui.<<http://www.suar.okezone.com.htm>> [15/09/13].
- Sedarmayanti, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syaiful, 2007. Pengertian dan perlakuan akuntansi belanja barang dan belanja modal dalam kaidah akuntansi pemerintahan. *Riset Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Sularso, Havid., Restianto, Yanuar E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Ekonomi*. Purwokerto.
- Sumarmi. 2008. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas PGRI.
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja Keuangan Pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia)*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Sesotyaningtyas, Mirna. 2012. Pengaruh Leverage Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*. Volume. 1: Nomor. 1: 1-6.

- Sekaran, Uma, Bougie, Roger. 2010. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. 5th Edition. Wiley.
- Thesaurianto, Kuncoro. 2007. *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kemandirian Daerah*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- <http://www.ksap.org>